

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat, pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi
2010	85.250.000.000	75.625.320.129
2011	119.000.000.000	98.705.063.186
2012	129.000.000.000	113.932.626.469
Jumlah	3.325.500.000.000	2.882.630.097.484

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Palembang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah itu maka pembangunan nasional harus diperlukan anggaran dari pemerintahan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintahan terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konskuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerah, disisi lain, pemerintahan sebagai pengantar pengembangan konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

kota Palembang nomor 12 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk mencapai perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri, sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintahan harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensi sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah berada pada seluruh wajib pajak, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah lain-lain. Menyediakan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Kunci kemandirian Daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar lagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah lain-lain. Menyediakan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui

peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal yang paling penting dalam masalah ini akan menjadi kunci kemandirian Daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar lagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah lain-lain

Selain itu kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada pemerintah kota Palembang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame, karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dikota Palembang.

Disamping itu Selain itu kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada pemerintah kota Palembang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame, karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dikota Palembang.

Kekuatan APBD paling besar diperoleh dari potensi pajak daerah yang dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Berlakunya undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu penyebab

rendahnya pendapatan dari sektor Pajak di kota Palembang. Evaluasi perolehan pajak reklame di kota Palembang membuktikan persentase pencapaiannya masih rendah, dan nilai tidak memenuhi target perencanaan pemerintahan kota. Dimana target pendapatan di awal APBD antara realisasi dan pencapaiannya tidak sebanding, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya, selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya mencapai perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dalam mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat. Sebaliknya, maka rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal yang bisa diukur adalah Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat. Sebaliknya, maka rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dan penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**PENGARUH PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi:

Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar dalam penelitian laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, yaitu tentang pengaruh pajak reklame Kota Palembang di Jalan Merdeka No.21 dengan analisis data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan realisasi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya adalah tersedianya data dan informasi mengenai pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penyusunan laporan ini adalah:

1. Bagi penulis

Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Kota Palembang.

2. Bagi dinas DPPK Kota Palembang

Sebagai masukan dan gambaran dari hasil laporan tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi pajak reklame untuk menyusun kebijakan dimasa datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

3. Bagi pembaca

Dapat dijadikan referensi bacaan serta dasar untuk penelitian lanjutan untuk generasi tahun yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penelitian ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek tempat penelitian melakukan penelitian, sebagai berikut Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak dan segala aspek mengenai analisis pengaruh pajak reklame.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan keadaan gambaran umum perusahaan, data yang mencakup jenis penelitian, sejarah berdiri perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan dan analisa data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil penelitian, serta melakukan analisa dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah berupa kesimpulan dan saran.